

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mensukseskan pembangunan, pemerintah harus dapat mendorong kelancaran dan kelangsungan usaha perbankan dalam bidang dana yang lebih besar dan diharapkan berasal dari dalam negeri serta mengalokasikan ke sektor yang lebih produktif. Perbankan sebagai alat perantara keuangan dan sarana penunjang bagi pembangunan menjadi semakin penting, mengingat dalam bisnis perbankan menuntut kepercayaan masyarakat agar tetap berkembang dengan baik yang ruang lingkupnya bukan hanya nasabah yang besar tetapi juga industri kecil, koperasi, dan kelompok usaha kecil terutama pada sistem penyaluran kreditnya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa lembaga keuangan mempunyai peranan yang penting terhadap perkembangan suatu negara.

Pembangunan nasional tidak lepas dari peranan usaha kecil dalam memberikan kontribusi baik berupa barang dan jasa. Usaha kecil di Indonesia dewasa ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam pemasaran, manajemen, produksi dan yang terpenting dalam permodalan.

Tumbuhnya sektor perbankan nasional adalah merupakan tujuan pemerintah agar bersama-sama dengan bank umum pemerintah mampu menjadi kompetitor yang sehat. Semakin besar dan sehatnya bank-bank pemerintah, terhadap masyarakat

dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan rencana program pemerintah dalam meningkatkan pembangunan disegala bidang.

Pembangunan nasional jangka panjang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi, dalam melaksanakan pembangunan nasional segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar pembangunan dapat berhasil. Untuk mengoptimalkan dana dan investasi tersebut, bank merupakan suatu media yang tepat melalui kegiatan perkreditan diberbagai jasa bank pada sektor perekonomian dan perbankan harus ikut andil dalam pembangunan ekonomi.

Sehubungan dengan itu pemerintah menetapkan bahwa usaha pemerataan harus mencakup program untuk memberikan kesempatan pada usaha kecil, guna dapat memperluas dan meningkatkan usahanya dengan mengikutsertakan usaha tersebut kedalam ruang lingkup yang tanggung jawab akan lebih besar. Dan hal ini dilakukan antara lain dengan memperkuat modalnya, meningkatkan keterampilannya dan untuk membantu pemasaran pada hasil produksinya.

Pencapaian dari sasaran pembangunan diupayakan melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah, baik yang bersifat makro sektoral maupun yang bersifat regional. Salah satu dari kebijakan perkreditan yang merupakan bagian dari kebijakan moneter. Disamping itu ada kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya. Dengan demikian kebijakan perkreditan ini harus lebih bersifat dinamis, sejalan dengan arah prioritas pembangunan. Oleh karena itu kebijakan perkreditan yang ditempuh ada dalam berbagai tahapan dalam pembangunan sejak

pelita I sampai saat ini memiliki arah dan ciri-ciri yang berbeda. Sesuai dengan kondisi perekonomian dan perbankan usaha kecil.

Bank sebagai *agent of development* berwujud pemeliharaan kestabilan moneter didalam negeri dan sebagai realisasinya adalah dalam fungsi dari program pemerataan melalui kredit usaha kecil (KUK) kepada pengusaha kelas menengah kebawah. Dan dengan dimulainya berbagai kebijakan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1 Deregulasi moneter dan perbankan sejak 1 Juni 1983 –
29 Mei 1993**

Tanggal / Tahun	Kebijakan	Tujuan / sasaran
1 Juni 1983	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebebasan penentuan suku bunga simpanan dan pinjaman 2. Menghilangkan sistem dalam pemberian kredit 3. Penggunaan dilakukan secara berangsur-angsur kredit likuiditas dari bank 4. Bank Indonesia akan memperkenalkan dari instrumen moneter, yaitu berupa sertifikat BI (SBI) dan fasilitas diskonto yang dapat digunakan oleh bank-bank sebagai 	Meningkatkan kemandirian perbankan

	alternatif dalam usaha pengendalian likuiditas	
25 Oktober 1986	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah penetapan dari bea masuk melalui pembatasan jumlah dan hambatan non tarif menjadi pembatasan tarif 2. Menyempurnakan dari fasilitas swap yang lebih memberikan dari kelancaran bagi para pengusaha penanaman modal asing (PMA /penanaman modal asing dalam negeri (PMDN) dan bank devisa 3. Modal asing akan diperkenalkan dalam memasuki perusahaan nasional, baik bagi PMDN / PMA serta peluang untuk mengeskpor hasil produksi perusahaan 	Memberikan perlindungan produksi dalam negeri yang lebih efisien, mendorong pemasukan modal dan dana dari luar negeri dan fasilitas dibidang penanaman modal
24 Desember 1987	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan angka pengenal ekspor (APE), termasuk APE sementara dan APE terbatas. 	Mendorong ekspor komoditi nonmigas dan pengembangan pariwisata

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengusaha yang ingin melakukan ekspor cukup menggunakan izin usaha yang ada 3. Untuk dapat mendorong pengembangan pariwisata nasional prosedur perizinan disederhanakan, dan daftar skala prioritas bidang pariwisata terbuka 	
27 Oktober 1988	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan pendirian bank swasta dan bank perkreditan rakyat (BPR) baru, kemudahan pembukaan kantor bank, dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) 2. Kemudahan peningkatan status menjadi bank devisa dan usaha pedagang valuta asing 3. Penurunan ketentuan kewajiban likuiditas minimum untuk perbankan dari 15% menjadi 2% dari jumlah kewajiban kepada pihak ketiga (giro, deposito, 	Meningkatkan pengerahan dana masyarakat, ekspor non migas, efisiensi lembaga keuangan dan perbankan dan menciptakan iklim pengembangan pasar modal

	<p>dan tabungan)</p> <p>4. pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito dan tabungan</p>	
20 Maret 1988	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesempatan pihak swasta menyelenggarakan bursa efek 2. Pembentukan bursa efek diberbagai kota, selain Jakarta 3. Menyederhanakan dari izin pendirian perusahaan asuransi baru dan campuran, serta lembaga pembiayaan 	Pengembangan pasar modal dan menyediakan alternatif sumber pembiayaan pembangunan
25 Maret 1989	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank devisa dan LKBB diberi kekuasaan menerima pinjaman luar negeri sepanjang bank dan LKBB dapat memelihara posisi devisa netto sebesar 25% dari modal sendiri 2. Bank umum dan bank pembangunan serta LKBB diperbolehkan memberikan kredit dalam valas, baik berupa kredit modal kerja maupun investasi serta 	Memaksimalkan penerahan dana masyarakat oleh lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank

	melakukan penyertaan modal	
29 Januari 1990	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank diwajibkan memenuhi kredit usaha kecil sebesar 20% dari portofolio perkreditan yang dibiayai dengan dana sendiri 2. Kredit likuiditas Bank Indonesia hanya diberikan untuk mendukung pelestarian akan swasembada pangan, pengembangan koperasi dan meningkatkan investasi 	Pengembangan usaha golongan ekonomi lemah dan mengurangi secara bertahap peranan kredit likuiditas Bank Indonesia
28 februari 1991	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan, kepemilikan, dan kepengurusan 2. Pedoman operasional atas dasar dari prinsip kehati-hatian 3. Sistem laporan 4. Tata cara penilaian kesehatan bank dan sanksi pelanggarannya 	Mewujudkan sistem perbankan yang lebih sehat dan efisien sehingga dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik

29 Mei 1993	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan beberapa ketentuan perbankan agar dapat lebih mendorong kredit 2. Mendorong perbankan untuk menangani masalah kredit macet yang dihadapi secara konsepsional 3. Mendorong perluasan atas pembiayaan perbankan bagi usaha menengah dan kecil 4. Tetap dalam mengendalikan pertumbuhan uang beredar dan kredit perbankan agar selalu dalam batas-batas yang aman bagi stabilitas ekonomi 	Untuk mendorong kelancaran kredit perbankan bagi usaha kecil dan menengah
-------------	---	---

Sumber: Bank Indonesia dalam kilasan sejarah bangsa

Dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan demi kebijakan oleh pemerintah sejak tahun 1983 dan pada tanggal 27 Oktober 1988 sebagai deregulasi lanjutan yang dikenal dengan sebutan pakto 1988 yang pada dasarnya bertujuan mendorong perkembangan kelembagaan perbankan. Selain untuk meningkatkan kemampuan perbankan dalam pemberian kredit, pada kebijakan tersebut, cadangan minimal bank di BI (*Reserve Requirement*) diturunkan dari 15% menjadi 2% sehingga pertumbuhan kredit diharapkan dapat meningkat.

Selanjutnya dalam rangka mendukung penyempurnaan kebijakan yang sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi 29 Mei 1993, pada awal tahun 1993 perekonomian Indonesia memasuki tahap konsolidasi dan pematapan. Dengan ditandai oleh beberapa hal yang menonjol, ekspor nonmigas terutama hasil-hasil industri tetap meningkat, produksi berbagai hasil pertanian, situasi neraca pembayaran, defisit transaksi berjalan mengecil ketingkat yang lebih baik. Pertumbuhan jumlah uang beredar cukup besar terutama pada awal tahun 1993, sehingga uang beredar yang berada ditangan masyarakat cukup besar. Dan dana yang dimiliki juga cukup besar, namun penyaluran dana perbankan dalam bentuk kredit kepada dunia usaha nampak tidak begitu lancar, maka untuk kelancaran kredit perbankan bagi usaha, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan pakmei 1993 yang ketentuannya ada pada tabel di atas.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang berperan aktif dalam mendukung terciptanya suatu iklim berusaha yang kondusif terhadap peningkatan investasi, melalui upaya pengendalian laju inflasi, nilai tukar rupiah yang tetap realistis, dan berupaya untuk mempengaruhi perkembangan suku bunga dalam batas-batas yang wajar, meningkatkan dan untuk memperluas akses golongan yang berpenghasilan rendah, untuk itu bagi pelayanan-pelayanan perbankan yang menunjang kegiatan-kegiatan yang produktif, yaitu dengan jalan memperluas jaringan pelayanan perbankan. Dan perkembangan dalam penyaluran kredit usaha kecil oleh perbankan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, yaitu:

1. Suku bunga kredit, dengan adanya kenaikan penawaran uang, maka tingkat suku bunga akan menurun. Tingkat suku bunga yang rendah akan menaikkan permintaan akan pinjaman bank, hal ini akan menaikkan investasi. (Faried Wijaya, 2001 : 95). Tingkat suku bunga kredit dan ketatnya penyaluran kredit mengakibatkan bank mengalami *negatif spread* yang pada akhirnya menciptakan lebih banyak lagi kredit macet (*Non Performing Loan*). Bila suku bunga dilihat dari sisi perbankan, semakin tinggi suku bunga kredit maka kredit yang diberikan akan semakin besar. Hal ini terjadi karena salah satu sumber pendapatan bank berasal dari selisih biaya antara tabungan dan kredit.
2. Dana simpanan masyarakat oleh bank yang dihimpun dari dana masyarakat yang berupa tabungan, deposito, giro. Merupakan pengerahan dana pembiayaan dan investasi dalam negeri yang dilakukan dan berasal dari sektor keuangan dan perbankan (Faried Wijaya, 1991 : 50). Dengan adanya peningkatan dana masyarakat yang disimpan di bank bisa digunakan untuk mendukung usaha yang produktif, melalui pemberian kredit perbankan atau dengan kata lain peningkatan dana masyarakat bisa berakibat semakin besar kredit perbankan yang diberikan pada pengusaha.
3. Inflasi, inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus (Insukindro, 1995 : 136). Kenaikan harga tersebut akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk mengajukan kreditnya, artinya, adanya inflasi mengakibatkan meningkatnya harga barang-barang modal (stok kapital) dan harga jasa (upah kerja) sebagai faktor produksi bagi usaha, maka permintaan dana yang

diperlukan untuk membeli barang-barang modal/kapital guna kelancaran proses produksi semakin meningkat. Sehingga dengan sendirinya kredit yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan sumber dana juga meningkat.

Di Indonesia ada beberapa terdapat usaha kecil yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Terkait dengan hal ini maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “ **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Usaha Kecil oleh Perbankan tahun 1983-2002 di Indonesia** “, dari hasil penelitian ini dapat diketahui apa saja yang menjadi permasalahan yang dihadapi dan dalam menentukan langkah selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia telah berlangsung lebih dari 25 tahun. Evaluasi terhadap kebijakan moneter dalam kurung waktu tersebut tentunya sangat penting dalam mengantisipasi permasalahan yang terjadi pada masa yang akan datang.

Berpijak dari latar belakang dan permasalahan serta pentingnya pengamatan pada sektor perbankan khususnya penyaluran kredit usaha kecil, sebelum dan setelah kebijakan 29 Mei 1993, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana perkembangan kredit usaha kecil oleh perbankan di Indonesia
2. Seberapa besar dampak, kebijakan 29 Mei 1993, jumlah bank dan kantor cabang bank, suku bunga kredit, dana simpanan masyarakat, inflasi, terhadap dana perbankan dalam penyaluran KUK.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dimulai sebelum dan sesudah kebijakan 1993 (tahun 1983 sampai tahun 2002), khususnya yang mengatur tentang perkreditan. Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti seberapa besar pengaruh dari kebijakan perbankan (sebelum dan setelah pakmei 93), dalam peningkatan dana penyaluran kredit usaha kecil oleh perbankan di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana perkembangan dari kredit usaha kecil oleh perbankan di Indonesia.
2. Menganalisis dan mengestimasi faktor, kebijakan 29 Mei 1993, jumlah bank dan kantor cabang bank, suku bunga kredit, dana simpanan masyarakat, inflasi terhadap dana perbankan dalam penyaluran KUK.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan dari penjabaran ilmu ekonomi terhadap faktor-faktor yang telah mempengaruhi penyaluran kredit usaha kecil.
2. Agar dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara yang didapat selama kuliah dengan yang ada di lapangan.

3. Sebagai bahan pertimbangan keputusan tentang metode atau langkah-langkah yang diambil dalam menentukan kebijakan moneter (perbankan) khususnya kredit usaha kecil.

F. Hipotesa Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan dari faktor jumlah bank dan kantor cabang bank terhadap dana bank dalam penyaluran KUK.
2. Diduga ada pengaruh yang negatif dan signifikan dari faktor suku bunga kredit terhadap dana bank dalam penyaluran KUK.
3. Diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan dari faktor dana simpanan masyarakat terhadap dana bank dalam penyaluran KUK.
4. Diduga ada pengaruh yang negatif dan signifikan dari faktor laju inflasi terhadap dana bank dalam penyaluran KUK.
5. Diduga Pakmei 93 menaikkan dana bank dalam penyaluran KUK.
6. Diduga krisis moneter 98 menurunkan dana bank dalam penyaluran KUK.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan baik data deskriptif maupun kuantitatif yang relevan, terarah dan bertujuan dengan masalah yang dihadapi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi jumlah bank dan kantor cabang bank, suku bunga kredit, dana simpanan masyarakat, dan inflasi. Data sekunder berupa data runtutan waktu (*time series*) dari tahun 1983 sampai dengan 2002. Data ini bersumber dari, Bank Indonesia cabang Yogyakarta dan Biro Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta.

2. Metode Pengambilan Data

Dalam penelitian ini diperlukan data untuk mendukung dan membantu dalam pengambilan keputusan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar dan sumber-sumber yang bersangkutan dengan penelitian ini.

H. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam pengujian ini yaitu metode deskriptif dan metode kuantitatif, metode kuantitatif adalah metode yang menguji dan menilai data yang terkumpul dengan menggunakan rumus yang diambil dari buku teks, serta mengupas teori yang bersangkutan untuk mencari ada dan tidaknya hubungan kuantitatif data yang diteliti. Sedangkan metode deskriptif adalah metode yang

menguji dan menilai setiap informasi dan data secara logika dengan mengacu pada teori yang ada (Suharsimi, 1986:191) .

Indikator-indikator kuantitatif yang digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Kredit Usaha Kecil (KUK) akan diukur melalui laju perkembangan kredit usaha kecil per tahun, adapun cara menghitung perkembangan KUK adalah:

$$\text{Perkembangan posisi KUK} = \text{KUK}_t - \text{KUK}_{t-1}$$

Dimana :

$$\text{KUK}_t = \text{Posisi KUK pada tahun sesudahnya}$$

$$\text{KUK}_{t-1} = \text{Posisi KUK pada tahun sebelumnya}$$

Laju akan pertumbuhan KUK menggambarkan seberapa besar perbankan Dalam menyalurkan kreditnya berupa KUK setiap tahunnya dalam persentase pada sektor-sektor ekonomi untuk membantu usaha kecil.

$$\text{Pertumbuhan Posisi KUK} = \frac{\text{KUK}_t - \text{KUK}_{t-1}}{\text{KUK}_{t-1}} \times 100\%$$

2. Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas (jumlah bank dan kantor cabang bank, suku bunga kredit, dana simpanan masyarakat, dan inflasi). Analisis tersebut dapat digunakan untuk menguji dan menarik kesimpulan hubungan dari berbagai variabel yang relevan, dengan demikian diharapkan akan menjawab hipotesis yang diajukan.

1. Analisis data

Alat analisis yang digunakan adalah bentuk regresi. Bentuk regresi adalah analisis yang berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel, variabel tak bebas, pada satu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan (*explanatory variable*), dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung (*mean*) atau rata-rata (populasi) variabel tak bebas, dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap (dalam pengambilan sampel berulang) variabel yang menjelaskan (yang belakangan) (Gujarati, 1978:12).

Istilah linier adalah suatu pengarapan bersyarat (*conditional expectation*) dari Y adalah fungsi linier dari X_1 . Secara ilmu ukur kurva regresi dalam kasus ini adalah garis lurus.

Dengan asumsi –asumsi tertentu yang biasanya disebut asumsi klasik, metode *Ordinary Least Square* (OLS) memberikan kepada kita semua alat yang diperlukan untuk penaksiran maupun untuk pengujian hipotesa dari model regresi linier.

a. Metode Deskriptif

Metode yang didasarkan pada analisa variabel-variabel yang dapat dinyatakan dengan rumus. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi KUK, maka lebih dahulu ditentukan variabel jumlah bank dan kantor cabang bank, suku bunga kredit, dana simpanan masyarakat dan inflasi, yang mana faktor tersebut pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan perubahan pada dana perbankan dalam penyaluran KUK.

b. Metode kuantitatif

Metode yang didasarkan pada analisis variabel yang dapat dinyatakan dengan menguatkan rumus yang pasti, untuk mengetahui pengaruh KUK, maka dilakukan analisa regresi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

Alasan regresi linier dipakai dalam penulisan ini karena :

1. Model regresi linier digunakan berdasarkan pada teori *loanable funds*. *Loanable funds* adalah dana bank yang akan dipinjamkan (Boediono: 76). Dalam penelitian ini adalah dana bank dalam penyaluran KUK (Y) yang dipengaruhi oleh beberapa variabel X, yaitu jumlah bank dan kantor cabang bank (X_1), suku bunga kredit (X_2), dana simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) (X_4). Dari variabel tersebut diperoleh model sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Dimana Y adalah dana bank dalam penyaluran KUK, X_1 jumlah bank dan kantor cabang bank, X_2 suku bunga kredit, X_3 dana simpanan masyarakat, dan X_4 inflasi. Disamping itu kondisi dan kebijakan ekonomi, juga dimungkinkan berpengaruh terhadap dana bank dalam penyaluran KUK. Variabel Pakmei 93, kebijakan pemerintah pada bulan Mei tahun 1993 diduga berpengaruh terhadap dana bank dalam penyaluran KUK, krismon 98, krisis moneter yang terjadi tahun 1998 diduga berpengaruh terhadap dana bank dalam penyaluran KUK.

Sedangkan pada variabel dummy digunakan dalam penelitian ini karena variabel X tidak bisa dihitung secara kuantitatif (angka), sebelum pakmei 93 dan sebelum krismon 98 adalah 0 dan setelah pakmei 93 dan setelah krismon 98 adalah 1.

Dari model di atas dibentuk persamaa menjadi :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 D_1 + \beta_6 D_2 + \mu$$

Dari model di atas dapat dijelaskan, jika jumlah bank dan kantor cabang bank meningkat maka kredit yang ditawarkan oleh bank akan meningkat sehingga mendorong pengusaha dalam meningkatkan usahanya (investasi) agar pengusaha mampu mengembalikan pinjaman dari bank. Hal ini berarti jika jumlah bank dan kantor cabang bank meningkat akan meningkatkan dana bank dalam penyaluran KUK, jika suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank menurun yang disebabkan menurunnya permintaan kredit oleh pengusaha, karena pengusaha tidak berani mengambil resiko (bangkrut) dengan naiknya suku bunga kredit, akan memberatkan pengusaha dalam pengembalian pinjaman dari bank. Hal ini berarti jika suku bunga naik dapat menurunkan dana bank dalam penyaluran KUK, jika dana simpanan masyarakat naik maka kredit yang ditawarkan oleh bank juga akan meningkat. Karena dana simpanan masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank yang nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini berarti jika

dana simpanan masyarakat meningkat akan meningkatkan dana bank dalam penyaluran KUK. Jika inflasi naik maka kredit yang ditawarkan bank dapat menurun, karena ongkos produksi naik menyebabkan turunnya investasi. Hal ini berarti jika inflasi naik dapat menurunkan dana bank dalam penyaluran KUK.

2. Berdasarkan pada model yang pernah digunakan oleh Sadwianto Kurniawan (2001) untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana kredit usaha kecil oleh bank di Indonesia. Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KUK = \beta_0 + \beta_1 DB + \beta_2 ID + \beta_3 IDR + \beta_4 INF + \mu$$

Dimana KUK adalah nilai kredit KUK, DB jumlah dana yang dihimpun oleh bank, ID tingkat suku bunga riil, IDR nilai kurs rupiah, INF nilai inflasi.

Dengan melihat data yang ada maka model yang digunakan oleh Sadwianto Kurniawan di atas dimodifikasi menjadi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 D_1 + \beta_6 D_2 + \mu$$

Dimana Y adalah dana perbankan dalam penyaluran KUK, X_1 jumlah bank dan kantor cabang bank, X_2 suku bunga kredit, X_3 dana simpanan masyarakat, dan X_4 inflasi, sedangkan variabel Dummy digunakan dalam penelitian ini karena variabel X tidak bisa dihitung secara kuantitatif (angka), sebelum pakmei 93 dan sebelum krismon 98 adalah 0, setelah pakmei 93 dan setelah krismon 98 adalah 1.

Bentuk hubungan dari berbagai variabel yang relevan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = f (X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Dari persamaan di atas akan diperoleh:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 D_1 + \beta_6 D_2 + \mu$$

Dimana :

Y = Dana perbankan dalam penyaluran KUK (Rp milyar) per tahun

X₁ = Jumlah bank dan kantor cabang bank (Unit) per tahun

X₂ = Suku bunga kredit (%) per tahun

X₃ = Dana simpanan masyarakat (Rp milyar) per tahun

X₄ = Inflasi (%) per tahun

D₁ = Variabel dummy (pakmei 93)

0 = sebelum (pakmei 93)

1 = setelah (pakmei 93)

D₂ = Variabel dummy (krismon 98)

0 = sebelum krismon

1 = setelah krismon

β₀ = Konstanta

$\beta_1-\beta_6$ = Parameter yang akan dihitung

u = Kesalahan pengganggu

Alasan variabel ini dipilih karena penulis mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Novie Suryanto dimana :

- a. Pada jumlah bank dan kantor cabang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan bank umum dalam penyaluran KUK.
- b. Pada suku bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan bank umum dalam penyaluran KUK.
- c. Pada dana simpanan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan bank umum dalam penyaluran KUK.
- d. Pada laju inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan bank umum dalam penyaluran KUK.

2. Data

a) Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dengan cara pengutipan data atau yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti atau hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tertentu dan mempunyai klasifikasi menurut kebutuhan pengumpulannya. Adapun data yang diperlukan adalah Kredit Usaha Kecil (KUK) menurut bank umum, jumlah bank dan kantor cabang bank, suku bunga kredit, dana simpanan masyarakat, dan inflasi.

Data yang digunakan dalam penelitian data *time series* yaitu 20 tahun dalam bentuk tahunan 1983 sampai tahun 2002.

b. Sumber Data

Data dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dan dilakukan pencatatan laporan tahunan bank Indonesia tahun 1983 sampai tahun 2002 untuk mendapatkan kredit usaha kecil (KUK), jumlah bank dan kantor cabang bank, suku bunga kredit, dana simpanan masyarakat didapat dari bank Indonesia Yogyakarta, sedangkan data inflasi didapat dari Biro Pusat Statistik (BPS)

Ukuran variabelnya sebagai berikut:

1) Jumlah bank dan kantor cabang bank

Yang dimaksud dengan Jumlah bank dan kantor cabang bank adalah banyaknya kantor bank maupun kantor cabang bank yang ada di seluruh Indonesia. Adapun data dari jumlah bank dan kantor cabang bank diperoleh dari laporan tahunan Bank Indonesia Yogyakarta dalam bentuk unit. Data dalam penelitian ini ialah *time series* dalam bentuk tahunan dari tahun 1983 – 2002.

2) Suku bunga kredit (modal kerja)

Suku bunga kredit bank merupakan besarnya bunga yang dibebankan kepada nasabah karena nasabah memiliki pinjaman uang atau modal kepada bank. Data dari suku bunga kredit bank diperoleh dari laporan tahunan Bank Indonesia Yogyakarta dalam bentuk % (persen). Data dalam penelitian ini ialah *time series* dalam bentuk tahunan dari tahun 1983 –2002.

3) Dana simpanan masyarakat

Dana simpanan masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana simpanan masyarakat ini terdiri dari giro, deposito dan tabungan. Data mengenai dana simpanan masyarakat diperoleh dari laporan tahunan Bank Indonesia Yogyakarta dalam bentuk angka (Rp milyar). Data dalam penelitian ini ialah *time series* dalam bentuk tahunan dari tahun 1983 –2002.

4) Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Data mengenai inflasi secara lengkap diperoleh dari Biro Pusat Statistik Yogyakarta dalam bentuk % (persen). Data dalam penelitian ini ialah *time series* dalam bentuk tahunan dari tahun 1983 –2002.

I. Pengujian Hipotesa

Pengujian hipotesa suatu model persyaratan yang mengasumsikan bahwa faktor pengganggu terdistribusikan secara normal disamping itu perlu pengujian terhadap ketetapan model yaitu menggunakan pengujian statistik dan ekonometrik. Adapun pengujian hipotesa tersebut meliputi :

1. Uji Statistik

a. Uji t (t-test)

1. Uji t X1 (jumlah bank dan kantor cabang bank)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel jumlah bank dan kantor cabang bank secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dana bank dalam penyaluran KUK.

Rumusan uji t adalah sebagai berikut:

$$T \text{ hitung} = \frac{\beta_1}{SE \beta_1}$$

Dimana:

β_1 = Koefisien regresi variabel jumlah bank dan kantor cabang bank

SE (β_1) = Standar error variabel jumlah bank dan kantor cabang bank

Hipotesis uji t adalah sebagai berikut:

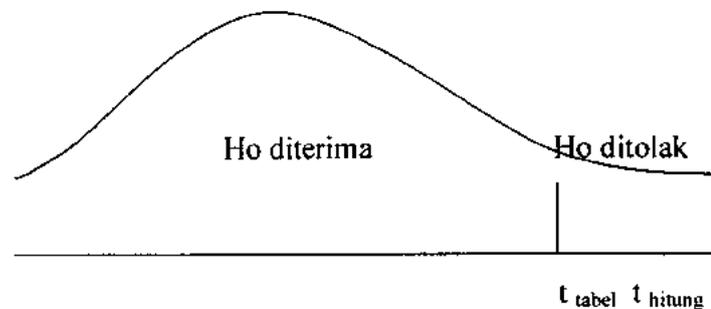
$H_0: \beta_1 \leq 0$ tidak ada pengaruh positif antara variabel jumlah bank dan kantor cabang bank terhadap variabel dana bank dalam penyaluran KUK.

$H_a: \beta_1 > 0$ ada pengaruh positif antara variabel jumlah bank dan kantor cabang bank terhadap variabel dana bank dalam penyaluran KUK.

Kesimpulan pengujian:

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak

Apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima



Gambar 1.1 Tes signifikan koefisien regresi jumlah bank dan kantor cabang bank terhadap dana bank dalam penyaluran KUK.

2. Uji t untuk X_2 (suku bunga kredit)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel suku bunga kredit secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dana bank

dalam penyaluran KUK.

Rumusan uji t adalah sebagai berikut:

$$T \text{ hitung} = \frac{\beta_2}{SE \beta_2}$$

Dimana:

β_2 = Koefisien regresi variabel suku bunga kredit

$SE(\beta_2)$ = Standar error variabel suku bunga kredit

Hipotesis uji t adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_2 \geq 0$ tidak ada pengaruh negatif antara variabel suku bunga kredit terhadap variabel dana bank dalam penyaluran KUK

$H_a: \beta_1 < 0$ ada pengaruh negatif antara variabel suku bunga kredit terhadap variabel dana bank dalam penyaluran KUK

Kesimpulan pengujian:

Apabila $-t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima

Apabila $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak



Gambar 1.2 Tes signifikan koefisien regresi suku bunga kredit terhadap dana bank dalam penyaluran KUK.

3. Uji t untuk X_3 (dana simpanan masyarakat)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel dana simpanan masyarakat secara individual mempengaruhi terhadap variabel dana bank dalam penyaluran KUK.

Rumusan uji t adalah sebagai berikut:

$$T \text{ hitung} = \frac{\beta_3}{SE \beta_3}$$

Dimana:

β_3 = Koefisien regresi variabel dana simpanan masyarakat

$SE \beta_3$ = Standar error variabel dana simpanan masyarakat

Hipotesis uji t adalah sebagai berikut:

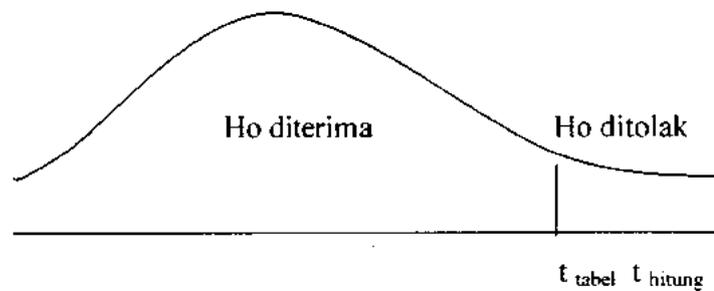
$H_0 : \beta_3 \leq 0$ tidak ada pengaruh positif antara variabel dana simpanan masyarakat terhadap variabel dana bank dalam penyaluran KUK

$H_a : \beta_3 > 0$ ada pengaruh positif antara variabel dana simpanan masyarakat terhadap variabel dana bank dalam penyaluran KUK.

Kesimpulan pengujian:

Apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak

Apabila $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima



Gambar 1.3 Tes signifikan koefisien regresi dana simpanan masyarakat Terhadap dana bank dalam penyaluran KUK.

4. Uji t untuk X_4 (inflasi)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel laju inflasi secara individual mempunyai pengaruh terhadap dana bank dalam penyaluran KUK. Rumusan uji t adalah sebagai berikut:

$$T \text{ hitung} = \frac{\beta_4}{SE \beta_4}$$

Dimana:

β_4 = Koefisien regresi variabel inflasi

$Se\beta_4$ = Standar error variabel inflasi

Hipotesa uji t adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_4 \geq 0$ tidak ada pengaruh negatif antara variabel laju inflasi terhadap dana bank dalam penyaluran KUK.

$H_a : \beta_4 < 0$ ada pengaruh negatif antara variabel laju inflasi terhadap dana bank dalam penyaluran KUK.

Kesimpulan pengujian:

Apabila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak

Apabila $t_{\text{hitung}} \geq t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima



Gambar 1.4 Tes signifikan regresi laju Inflasi secara individual terhadap dana bank dalam penyaluran KUK

5. Uji t untuk d_1

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel pakmei 93 secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dana bank dalam penyaluran KUK.

Rumus uji t :

$$T_{hitung} = \frac{\beta_5}{SE\beta_5}$$

Dimana :

β_5 = koefisien regresi variabel pakmei 93

$SE\beta_5$ = standar error variabel pakmei 93

Hipotesis uji t adalah sebagai berikut :

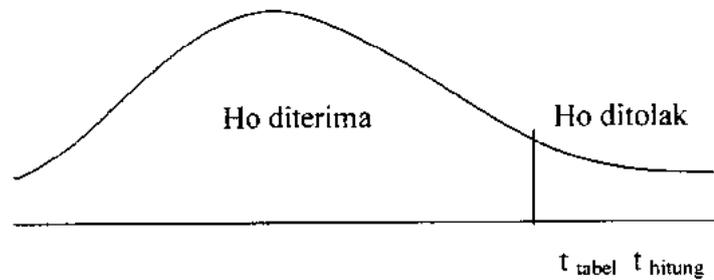
$H_0 : \beta_5 \leq 0$ pakmei 93 tidak menaikan dana bank dalam penyaluran KUK.

$H_a : \beta_5 > 0$ pakmei 93 menaikan dana bank dalam penyaluran KUK.

Kesimpulan pengujian:

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak

Apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima



Gambar 1.5 Tes signifikan regresi pakmei 93 secara individual terhadap dana bank dalam penyaluran KUK

6. Uji t untuk d_2

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel krismon 98 secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dana bank dalam penyaluran KUK.

Rumus uji t :

$$T_{hitung} = \frac{\beta_6}{SE\beta_6}$$

Dimana :

β_6 = koefisien regresi variabel krismon 98

$SE\beta_6$ = standar error variabel krismon 98

Hipotesis uji t adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_6 \geq 0$ krismon 98 tidak menurunkan dana bank dalam penyaluran KUK.

$H_a : \beta_6 < 0$ krismon 98 menurunkan dana bank dalam penyaluran KUK.

Kesimpulan pengujian:

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 diterima

Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 ditolak



Gambar 1.6 Tes signifikan regresi krismon 98 secara individual terhadap dana bank dalam penyaluran KUK

b. uji F (F-test)

Selain perlu menguji apakah koefisien regresi secara individu signifikan atau tidak dalam mempengaruhi variabel dependen, perlu juga diuji untuk membuktikan secara serempak koefisien regresi jumlah bank dan kantor cabang bank, suku bunga kredit, dana simpanan masyarakat, dan laju inflasi juga signifikan mempengaruhi terhadap variabel dana bank dalam penyaluran KUK. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / k-1}{1-R^2 / (n-k)}$$

Dimana:

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data

k = Jumlah variabel

Hipotesa uji F adalah sebagai berikut:

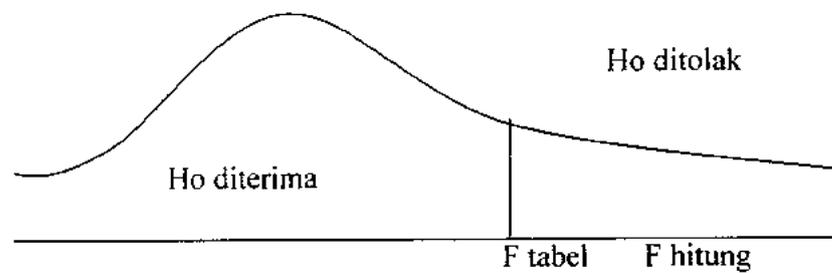
$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ tidak ada pengaruh antara variabel jumlah bank dan kantor cabang bank, suku bunga kredit, dana simpanan masyarakat, dan laju inflasi terhadap dana bank dalam penyaluran KUK.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ ada pengaruh antara variabel jumlah bank dan kantor cabang bank, suku bunga kredit, dana simpanan masyarakat dan laju inflasi terhadap dana bank dalam penyaluran KUK

Kesimpulan pengujian:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak



Gambar 1.7 Tes signifikan koefisien regresi jumlah bank dan kantor cabang bank suku kredit, dana simpanan masyarakat dan laju infasi terhadap dana bank dalam penyaluran KUK.

c. Uji R^2

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebaikan fungsi regresi yang dicocokkan terhadap data koefisien determinasi majemuk merupakan iktisar yang menyatakan seberapa baik fungsi regresi sampel dibanding dengan data empirisnya. Secara verbal, R^2 mengukur bagian atau prosentase total variasi untuk yang dijelaskan oleh model regresi.

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan sempurna antara variabel independen dengan variabel dependen dalam model

regresi. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dengan membandingkan koefisien determinasi (R^2) dari regresi keseluruhan dengan koefisien determinasi parsial (r^2) dari regresi antar variabel independen jika ditemukan bahwa $r^2 > R^2$ pada model penelitian maka dari model tersebut terdapat Multikolinearitas dan sebaliknya jika $r^2 < R^2$ maka ini menunjukkan tidak terdapat Multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas yaitu semua gangguan (ut) mempunyai varians yang sama (Homoskedastik). Masalah homoskedastik lebih biasa dalam data *cross section* dibanding dengan data time series. (Gujarati, 1978 : 179). Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas dapat digunakan uji white yaitu dengan meregresi nilai kuadrat sebagai variabel dependen dengan semua variabel dependen jumlah bank dan kantor cabang bank, suku bunga kredit, dana simpanan masyarakat, dan laju inflasi.

Apabila nilai observasi $\chi^2 < \chi^2$ Tabel, maka tidak ditemukan adanya Heteroskedastisitas dan sebaliknya jika nilai observasi $\chi^2 > \chi^2$ Tabel, maka didalam model yang dianalisis terdapat heteroskedastisitas.

c. Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian pengamatan yang diurutkan menurut waktu (*time series*) atau ruang (*cross section*). Dalam suatu regresi linier, apabila faktor pengganggu (residu) pada suatu pengamatan dipengaruhi oleh faktor pengganggu (residu) pada pengamatan yang lain maka dalam regresi tersebut terkena autokorelasi. Jika suatu regresi terjadi autokorelasi maka hasil uji F maupun R square tidak bisa dipercaya lagi.

I. Sistematika Isi Skripsi

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian data dan sistematika isi skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Kajian pustaka, berisikan uraian mengenai penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk melandasi teori dari penelitian ini.

BAB III : Landasan Teori

Landasan teori, berisikan teori atau konsep yang sesuai untuk melandasi penelitian ini sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV : Gambaran Umum

Gambaran umum, menjelaskan sekilas pandang tentang perkembangan Perkreditan oleh perbankan di Indonesia sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti yaitu jumlah bank dan kantor cabang bank, dana simpanan masyarakat, suku bunga kredit, inflasi.

BAB V : Analisis Data dan Pembahasan

Analisis data dan pembahasan, menjelaskan dari rangkain kegiatan yang Mendukung objek yang akan diteliti dan data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan metode yang telah ditentukan.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran, mengenai kesimpulan dan saran yang diajukan penulis yang berkaitan dengan penelitian ini

Daftar Pustaka

Lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah kredit usaha kecil, penelitian tersebut antara lain:

1. Sadwianto Kurniawan (2001)

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana kredit usaha kecil oleh bank di Indonesia dengan menggunakan sampel pada tahun 1992-1997 dan menggunakan regresi linier, memberikan kesimpulan antara lain :

- a. Secara keseluruhan variabel-variabel independen (Dana bank, suku bunga, kurs, dan inflasi) berpengaruh terhadap variabel dependen (KUK) dan berdasarkan uji R^2 terdapat hubungan yang erat antara variabel dependen tersebut, yang ditunjukkan oleh nilai uji R^2 yang cukup tinggi mendekati nilai 1 (satu)
- b. Hubungan antara fungsi suku bunga dengan variabel inflasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan
- c. Hasil regresi dana bank terhadap suku bunga deposito ternyata tidak signifikan terhadap jumlah dana bank
- d. Variabel dana bank mempunyai koefisien yang positif dan signifikan terhadap kredit usaha kecil
- e. Penelitian membuktikan bahwa penggunaan model regresi linear adalah tepat yang ditunjukkan oleh R^2 dan F statistik yang tinggi.

2. Iswan Iskandar (1995)

Penelitian tentang penyaluran dana perbankan untuk kredit usaha kecil dari bank-bank milik pemerintah di Indonesia, dengan menggunakan sampel pada tahun 1983-1993 menggunakan regresi linier memberikan kesimpulan :

- a. Dana perbankan milik pemerintah mempunyai pengaruh yang nyata yang positif terhadap penyaluran dana bagi kredit usaha kecil
- b. Pertumbuhan ekonomi ternyata memiliki pengaruh yang negatif terhadap penyaluran dana bagi kredit usaha kredit.
- c. Perubahan tingkat bunga deposito pada bank-bank milik pemerintah mempunyai pengaruh nyata yang positif terhadap penyaluran kredit usaha kecil

3. Erwin (1998)

Penelitian tentang penyaluran kredit usaha kecil di Indonesia dengan menggunakan sampel pada tahun 1990-1995 memberikan kesimpulan antara lain :

- a. Pada suku bunga deposito ternyata variabel inflasi tidak memberikan pengaruh yang nyata yang signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito (Inflasi berpengaruh negatif terhadap suku bunga deposito).
- b. Suku bunga deposito berpengaruh negatif terhadap dana bank, karena hal ini dikarenakan dalam hal mencari upaya peningkatan dana bagi bank, pihak perbankan tidak hanya menggunakan instrumen yang lain.

- c. Produk domestik bruto riil berpengaruh positif terhadap dana bank, karena dengan adanya pendapatan masyarakat selain meningkatkan tingkat konsumsi juga meningkatkan tingkat bunga.
- d. Uang kartal berpengaruh positif terhadap jumlah dana bank, karena dengan meningkatnya uang kartal (kertas dan logam) di masyarakat berarti terjadi peningkatan kegiatan transaksi ekonomi, hal ini akan membawa dampak pada meningkatnya intensitas hubungan masyarakat dengan pihak perbankan yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap penambahan jumlah dana bank.
- e. Produk Domestik Bruto Riil berpengaruh positif terhadap kredit usaha kecil.
- f. Dana bank berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit bagi usaha kecil, dengan adanya kenaikan jumlah dana perbankan akan memberikan dampak terhadap kenaikan penyaluran kredit bagi sektor usaha kecil.

4. Asmoro Budi Utomo (1996)

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kredit usaha kecil dengan menggunakan sampel tahun 1996 memberikan kesimpulan :

- a. Terdapat hubungan yang nyata dan positif antara pendapatan yang diterima oleh pengusaha kecil terhadap jumlah kredit yang di terima oleh pengusaha kecil.
- b. Terdapat hubungan yang nyata dan negatif antara omset penjualan yang dimiliki dengan jumlah kredit yang di terima oleh pengusaha kecil.

5. Novie Suryanto (2003)

Penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan penyaluran kredit usaha kecil bank umum dengan menggunakan sampel pada tahun 1991-2002 memberikan kesimpulan :

- e. Pada jumlah bank dan kantor cabang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan bank umum dalam penyaluran KUK. Pada suku bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan bank umum dalam penyaluran KUK.
- f. Pada dana simpanan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan bank umum dalam penyaluran KUK.
- g. Pada laju inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan bank umum dalam penyaluran KUK.

6. Mudrajad Kuncoro (2002)

Dalam bukunya yang berjudul manajemen perbankan teori dan aplikasi menerangkan adanya pola pertumbuhan ekonomi secara sektoral di Indonesia sejalan dengan kecenderungan proses transformasi struktural yang terjadi di berbagai negara, dimana terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian (sering disebut sektor primer), sementara sektor sekunder dan tersier cenderung meningkat. Penurunan ini terjadi yang semula pada tahun 1965-1980 menyumbang devisa 11,9 persen, menjadi 6,1 persen selama 1980-1992. Industri kecil dan menengah cenderung mengalami peningkatan. Untuk itu perlu perhatian khusus terhadap perkembangan industri ini.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank

Fungsi usaha bank memerlukan intermediary (perantara) atau pihak yang akan memerlukan dana (debitur) dan yang akan kelebihan dana (kreditur). Ada yang telah mendefinisikan bank sebagai suatu badan usaha yang bertugas dalam menghimpun dana dari pihak ketiga, sedangkan definisi lain mengatakan bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan untuk permintaan kredit pada waktu yang ditentukan (Tomas.S, 1991:1).

Menurut Undang-undang No 10 tahun 1998 memberikan definisi bank yaitu suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 1998:23).

Berbagai macam definisi tentang bank dapat dikelompokkan menjadi 3 definisi:

1. Bank dilihat sebagai penerimaan kredit, bank menerima uang serta dana-dana lain dari masyarakat berupa simpanan, deposito, giro.
2. Bank dilihat sebagai pemberi kredit. Ini berarti bank melaksanakan operasi secara efektif.

3. Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber-sumber yang bermodal sendiri, simpanan tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

Menurut Undang-Undang perbankan no 10 tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

B. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang perbankan no 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu juga dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" yang artinya percaya. Maksud dari percaya dari si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu (Kasmir,2000:93).

C. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut ini: (Martono, 2002:23)

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan (berupa uang, barang, jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah bank baik secara interen maupun dari eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan masa sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani kewajibanya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang akan diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka waktu menengah atau jangka panjang.

4. Resiko

Adanya tenggang waktu dalam pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang pemberian suatu kredit maka semakin besar pula dengan resikonya. Resiko

ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa adanya unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang kita kenal dengan Nama bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

D. Tujuan Dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian dari kredit tersebut tidak akan lepas dari misi bank tersebut didirikan. Disamping mengandung suatu fungsi (Kasmir, 1988:79)

Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, diharapkan debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang akan disalurkan oleh perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyaknya kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya kredit adalah :

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah bank.
- b. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.
- c. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- d. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

Fungsi kredit secara luas antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan dana guna uang

Dengan adanya kredit akan dapat meningkatkan dana guna uang, maksudnya uang jika disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

Dengan diberikannya Kredit uang tersebut akan menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh sipenerima kredit.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna dan bermamfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula meningkatkan dan memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas nasional

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kredit dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu hal ini akan meningkatkan kegairahan usaha, apalagi bagi nasabah yang memang mempunyai masalah di modal.

- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang diberikan akan semakin baik terutama dalam hal untuk Meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun sebuah pabrik, maka pabrik itu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Dan disamping itu bagi masyarakat disekitarnya juga akan dapat untuk meningkatkan pendapatannya.

E. Jenis-Jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat diberbagai segi antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaannya

- a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau keperluan rehabilitasi.

- b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja untuk membelikan bahan baku, membayar

gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kreditnya

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang diberikan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan atau dipakai seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit untuk mobil.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang-barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah yang besar.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya kredit peternakan ayam.

b. Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun biasanya untuk investasi. Contohnya kredit untuk pertanian.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Dan Kredit jangka Panjang waktu pengembaliannya diatas tiga sampai lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan dan kredit untuk konsumtif.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk Barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama bagi si calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari sektor usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek.

- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar
- d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk mahasiswa.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada profesional seperti dosen, doktor, pengacara
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor lainnya.

F. Aspek-Aspek Penilaian Kredit

1. Aspek yuridis/hukum, aspek penilaian ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian ini mulai dari akte pendirian dari perusahaan sampai besarnya laba yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut.
2. Aspek pemasaran, aspek yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan yang akan datang prospeknya bagaimana.
3. Aspek keuangan, aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

4. Aspek teknis, aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti mesin yang digunakan, masalah lokasi.
5. Aspek manajemen, untuk struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusianya
6. Aspek sosial ekonomi, menganalisis tentang bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat.
7. Aspek amdal, menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, udara, dan air. Jika proyek atau perusahaan tersebut dijalankan apakah ada pencernaan atau tidak terhadap lingkungan.

G. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar akan dikembalikan. Kenyakinan tersebut akan diperoleh dari hasil penilaian kredit, sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapat keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Adapun penjelasan tentang analisa ini, yaitu dengan lima C kredit adalah sebagai berikut: (Mudrajat Kuncoro, 2002:75)

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau waktu dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuan dalam menjalankan usahanya. Dan pada akhirnya akan dapat dilihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang sekarang ini.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah bank berupa fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai suatu kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dengan prospek bidang usaha yang dibiayai, hendaknya benar-benar telah memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

H. Pengertian Kredit Usaha Kecil (KUK)

Paket tentang kebijakan 29 mei 1993 dan surat keputusan direksi bank Indonesia no 26/24/Kep/Dir tanggal 29 mei 1993 menetapkan bahwa, yang dimaksud dengan kredit usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimal Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif. Kredit tersebut dapat berupa investasi maupun kredit modal kerja. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk membiayai pembelian barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi proyek atau pendirian proyek baru. Kredit modal kerja merupakan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek (Sri susilo, dkk, 2000:80).

Pengertian dari usaha kecil adalah usaha yang memiliki total aset maksimal Rp. 600. 000 , 00 (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati. Dengan memperhatikan UU No.9/1995 tentang usaha

kecil, yang dimaksud usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih maksimum Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha
2. Hasil penjualan tahunan maksimum Rp. 1 juta milyar
3. Milik Warga Negera Indonesia (WNI)
4. Berdiri sendiri

I. Batas Minimum KUK

Semua bank umum, bank asing dan bank campuran wajib memenuhi ketentuan atas ditetapkan dasar pencapaian ratio total, yaitu sebagai berikut: (Susilo, 2000:27)

1. Ratio KUK $> 20,0\%$, besarnya kewajiban minimum 22,5% dari ekspansi kredit netto
2. Ratio KUK $< 20,0\%$, besarnya kewajiban KUK minimum 25,0% dari ekspansi kredit netto

Ratio bank tentang kemampuan untuk membayar kembali kewajiban dengan menarik kembali kredit yang diberikan kepada debitur atau kemampuan bank untuk menyalurkan kredit dengan dana sendiri (*loan to asset ratio*).

J. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Perbankan Dalam Menyalurkan KUK.

1. Jumlah bank dan kantor cabang bank

Peningkatan jumlah bank sangatlah bermanfaat dan diharapkan oleh masyarakat, karena dewasa ini peran perbankan sangatlah penting. Hal ini disebabkan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang membutuhkan jasa layanan dari bank. Dalam hal ini mengenai perkreditan kegiatan, yang mana kredit perbankan ini bila berjalan dan berguna bagi masyarakat jika terdapat jumlah bank yang mencakupi dan dengan syarat bank tersebut dalam keadaan sehat. Karena dengan banyaknya jumlah bank yang ada, hal ini bisa mendorong meningkatnya kegiatan kredit perbankan dalam melayani kredit perbankan. Dengan jumlah bank yang mencakupi pula, masyarakat bisa memilih bank mana yang cocok untuk pengambilan kredit perbankan sesuai persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Menurut beberapa kalangan dunia pengambil kredit, tingkat suku bunga pinjaman bank pemerintah tidak mengurangi minat dunia usaha pengambilan kredit karena pelayanan mereka lebih luwes, cepat, dan memuaskan (Faried Wijaya,1991;45);

2. Suku bunga kredit

Jika terjadi kenaikan pada suku bunga kredit menyebabkan menurunnya permintaan akan kredit perbankan oleh usaha kecil sehingga menurunkan dana perbankan dalam penyaluran KUK.

3. Dana simpanan masyarakat

Dana simpanan masyarakat merupakan dana masyarakat yang disimpan di bank meliputi giro, deposito berjangka, dan tabungan yang dialokasikan dalam bentuk kredit (Nopirin,1995:25);

Menurut UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan bab 1 pasal 1 yang dimaksud dengan.

- a. Giro adalah simpanan masyarakat yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahan buku
- b. Deposit berjangka adalah simpanan yang hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan
- c. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cara cek atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

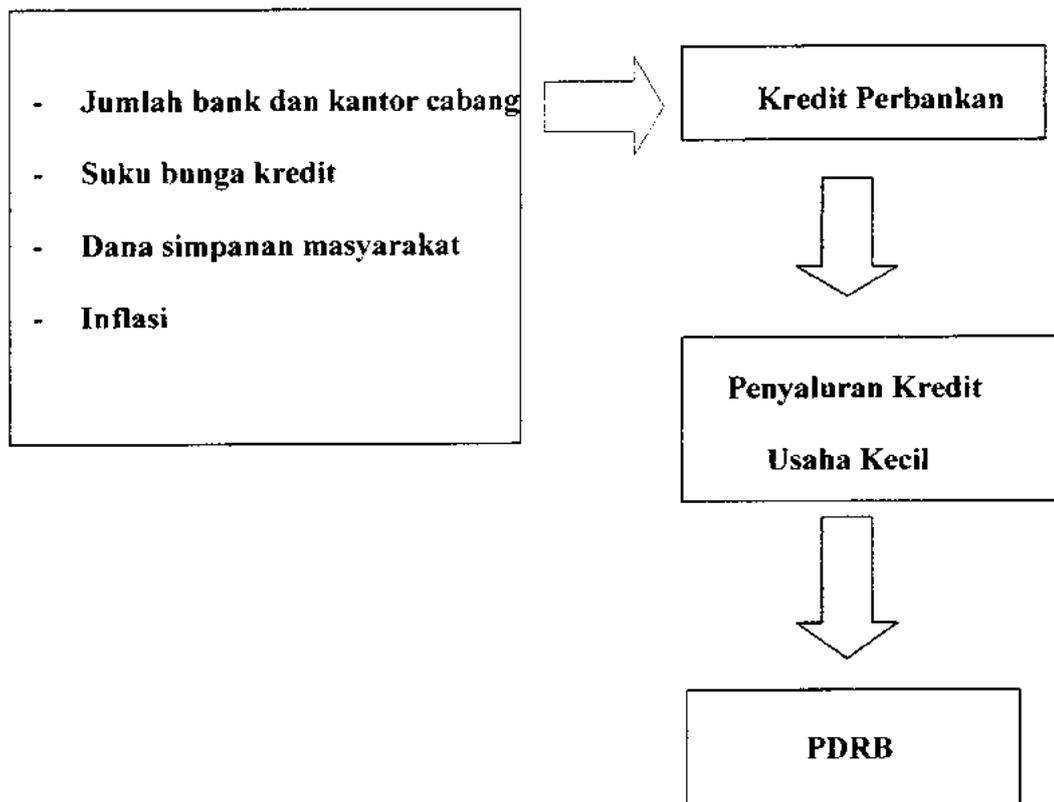
4. Inflasi

Naiknya laju inflasi, sementara tingkat bunga simpanan dari bank tetap, akan mengakibatkan turunnya tingkat bunga riil perbankan. Kondisi ini akan mempengaruhi perilaku penyimpan, dimana para penyimpan akan mengurangi simpanannya di bank dan digunakan untuk melakukan pembelian barang dan jasa atau diinvestasikan dalam bentuk lain (Boediono,1998:162).

K. Kerangka Pemikiran

Pembangunan nasional dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita karena ini merupakan pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat, hubungan antara kredit perbankan dan investasi yaitu dengan adanya tambahan dana dari kredit perbankan, maka modal untuk investasi meningkat juga. Dana penyaluran perbankan di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor yaitu, pertama faktor jumlah bank dan kantor cabang bank, kedua faktor suku bunga kredit, ketiga faktor dana simpanan masyarakat, dan faktor keempat tingkat inflasi.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut menyebabkan adanya kredit perbankan yang kemudian dialokasikan kepada kredit usaha kecil, dan membawa dampak terhadap perekonomian daerah yang berupa peningkatan wilayah (Tulus TH, 2002; 113-114). Apabila digambarkan dalam diagram, maka sebagai berikut :



Gambar 1.8 Diagram Alur Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Perbankan Dalam Penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK)

Jumlah bank dan kantor cabang bank, jika jumlah bank dan kantor cabang bank meningkat maka kredit perbankan juga akan mengalami peningkatan. Hal ini akan membawa peningkatan terhadap penyaluran kredit usaha kecil. Dan dampaknya terhadap perekonomian daerah adalah berupa peningkatan pendapatan wilayah.

Suku bunga kredit, jika suku bunga kredit naik maka kredit yang diberikan akan menurun. Sehingga penyaluran kredit usaha kecil juga akan mengalami

penurunan yang akan membawa dampak terhadap perekonomian daerah berupa penurunan pendapatan wilayah.

Dana simpanan masyarakat, jika dana simpanan masyarakat maka kredit perbankan juga akan mengalami peningkatan, sehingga penyaluran kredit usaha kecil akan mengalami peningkatan, yang dapat meningkatkan perekonomian daerah berupa peningkatan pendapatan wilayah.

Inflasi, jika inflasi naik, menyebabkan pengusaha tidak berani dalam mengajukan kredit baru, karena ongkos produksi naik dan investasi menurun sehingga penyaluran kredit usaha kecil mengalami penurunan.

Tiga sifat penting dimana pertumbuhan ekonomi (Hadi Prayitno, 1986 : 42) :

- a. Suatu proses, merupakan perubahan secara terus menerus.
- b. Suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita.
- c. Kenaikan dari pendapatan perkapita tersebut harus terus berlangsung dalam jangka panjang

Pembangunan nasional dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita yang merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi sebagai suatu upaya mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, pembangunan ekonomi terbatas hanya sebagai usaha masyarakat untuk mengembangkan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat.

Untuk mempertegas dari hipotesa kenapa ada dugaan positif dan negatif dari variabel yang digunakan maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah Bank dan Kantor Cabang Bank

Jika jumlah Bank dan kantor cabang bank meningkat akan mendorong menguatnya kegiatan kredit perbankan dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang membutuhkan layanan dari bank (meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank) agar mendorong meningkatnya investasi. Sehingga KUK dapat meningkatkan usaha agar dapat mengembalikan pinjaman dari bank sehingga dapat meningkatkan dana bank dalam penyaluran KUK oleh bank.

2. Suku bunga kredit

Jika suku bunga kredit naik akan mengurangi minat usaha kecil dalam mengajukan kredit baru, karena dengan naiknya suku bunga kredit akan menyulitkan usaha kecil dalam melanjutkan usahanya dan pengembalian pinjaman dari bank sehingga akan menurunkan investasi. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya dana bank dalam penyaluran KUK.

3. Dana simpanan masyarakat

Dana simpanan masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dengan meningkatnya dana pihak ketiga akan meningkatkan pemberian kredit oleh bank karena dana pihak ketiga yang didapat dari dana simpanan masyarakat akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk kredit hal ini akan mendorong

meningkatkan Investasi sehingga nantinya dapat meningkatkan dana bank dalam penyaluran KUK.

4. Inflasi

Jika inflasi naik akan menyebabkan naiknya ongkos produksi, sehingga menurunkan investasi pengusaha tidak berani dalam mengajukan kredit baru, karena ongkos produksi naik dan investasi menurun sehingga penyaluran kredit usaha kecil mengalami penurunan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Perkembangan Kredit Usaha Kecil

Dalam rangka mewujudkan pemerataan aspek-aspek pembangunan, sektor usaha kecil menduduki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, baik dilihat dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas atau kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Secara terinci peranan strategis dari usaha kecil tersebut antara lain :

1. Jumlah yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi
2. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dengan harga yang terjangkau
3. Potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja, karena setiap unit investasi pada sektor usaha kecil dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila di bandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar dan menengah

Dari dasar dan arah kebijakan perkreditan tersebut, terkandung misi kebijakan moneter yakni menciptakan kondisi moneter yang di perlukan untuk dapat kestabilan nilai rupiah dan neraca pembangunan serta dapat mendorong kelancaran produksi, pembangunan serta perluasan kesempatan kerja guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan misi ini prioritas yang dapat menunjang pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja serta mempunyai dampak ganda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk koperasi dan sektor pedesaan.

Selama periode pembangunan jangka panjang (25 tahun) tahap I sejak PELITA I (1968 / 1969 – 1973 / 1974) sampai dengan pelita V (1989 /1990 -1993 / 1994), kebijakan di bidang perkreditan telah meletakkan tonggak sejarah yang memberikan ciri kebijakan yang dinamis sesuai dengan tahapan pembangunan pada waktu itu.

Pada periode sebelum 1 juni 1983, khususnya awal pelita I kebijakan di bidang perkreditan lebih diarahkan pada upaya mencari stabilitas moneter sebagai akibat dari kondisi ketidakstabilan moneter yang terjadi pada waktu itu laju inflasi sangat tinggi. Pada periode tersebut, piranti-piranti moneter dan perkreditan langsung lebih menonjol, baik dalam penetapan pagu ekspansi pasiva netto perbankan maupun dalam bentuk penciptaan skim-skim kredit perbankan yang di dukung dengan kredit likuiditas Bank Indonesia sebagai akibat terbatasnya dana masyarakat.

B. Program Pengembangan Usaha Kecil

Kebijakan deregulasi 29 mei 1993 dan kebijakan lanjutannya

Setelah berhasil melewati masa pendinginan, pada awal tahun 1993 perekonomian memasuki tahap konsolidasi dan pemanfaatan. Situasi ini di tandai oleh beberapa hal yang menonjol, ekspor non migas terutama ekspor hasil-hasil

industri tetap meningkat, produksi berbagai hasil pertanian cukup baik. Situasi neraca pembayaran cukup mantap, defisit transaksi berjalan mengecil ketingkat yang lebih wajar, dibidang moneter situasi tetap terkendali. Pertumbuhan uang beredar cukup besar terutama pada beberapa bulan awal tahun 1993, sehingga uang yang berada di tangan masyarakat cukup banyak. Dana yang di miliki perbankan juga cukup besar, namun arus penyaluran dana perbankan dalam bentuk kredit kepada dunia usaha nampak tidak begitu lancar karena adanya berbagai kendala.

Melihat perkembangan penyaluran kredit yang kurang mengembirakan tersebut. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk lebih memperlancar kredit perbankan bagi dunia usaha, dengan mengeluarkan paket kebijakan pada tanggal 29 mei 1993, yang di kenal dengan sebutan pakmei 93. adapun paket ini , berisikan tentang menyempurnakan beberapa ketentuan perbankan agar dapat lebih mendorong perluasan kredit dengan tetap berpedoman kepada azas-azas perkreditan yang sehat. Dalam pakmei 93 tersebut antara lain telah di sempurnakan ketentuan kredit usaha kecil (KUK) dengan pokok-pokok penyempurnaan sebagai berikut :

- a. Pagu KUK di naikan dari Rp 200 juta menjadi 250 juta
- b. Kredit sampai dengan Rp 25 juta tanpa melihat jenis penggunaannya di masukan kedalam cakupan KUK
- c. Kerja sama penyaluran KUK yang terdiri dari pemberian KUK kepada BPR, pembiayaan bersama, penyaluran kredit dan anjak piutang selanjutnya di perluaskan dengan memperkenalkan SBPU KUK

Sebagai langkah untuk mewujudkan sasaran pakmei 93 tersebut, Bank Indonesia telah menerapkan empat strategi dasar dalam pengembangan usaha kecil, yaitu :

- a. Pertama, mendorong komitmen perbankan untuk melayani usaha kecil dengan mewajibkan sebagian kredit kepada usaha kecil. Kredit usaha kecil tersebut meliputi seluruh pemberian kredit kepada usaha kecil baik yang di berikan dari dana sendiri maupun yang di dukung dengan KLBI, dana APBN atau bantuan luar negeri
- b. Kedua, melaksanakan berbagai kredit program untuk mendorong pemberian kredit usaha kecil kepada sektor-sektor atau jenis usaha tertentu, diantara kredit-kredit program ini ada ada yang seluruh atau sebagian dananya bersumber dari KLBI, ada yang bersumber dari APBN atau dana bantuan luar negeri dan ada lagi yang seluruhnya di biayai dengan dana bank-bank sendiri
- c. Ketiga, mengembangkan kelembagaan dengan memperluas jaringan perbankan, mendorong kerja sama antara bank dalam penyaluran kredit usaha kecil dan mengembangkan lembaga-lembaga keuangan sesuai dengan kebutuhan penduduk yang berpenghasilan rendah, seperti pendirian bank perkreditan rakyat dan bank perkreditan rakyat syariah. Kebijakan kelembagaan ini sangat diperlukan karena kebijakan kredit usaha kecil yang telah di rumuskan tidak akan berhasil tanpa di sertai dengan perbankan pada kelembagaan keuangan sebagai jembatan antara kebijakan kredit dan usaha kecil. Oleh karena itu, keberadaan jaringan

kantor perbankan perlu di perluas dan di tingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas guna menjangkau usaha kecil yang berada di pedesaan. Dengan menyadari bahwa pembiayaan pelayanan usaha kecil itu tinggi, maka peningkatan jumlah kelembagaan keuangan yang mampu menjangkau usaha kecil sangat penting artinya.

- d. Keempat, meningkatkan kemampuan bantuan teknis melalui proyek pengembangan usaha kecil (PPUK), proyek hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat (PHBK) dan proyek kredit mikro (PKM) sebagaimana diketahui, sejak tahun 1978 bank Indonesia telah menyediakan bantuan teknis melalui PPUK diseluruh Indonesia dengan memberikan pelayanan kepada perbankan maupun calon nasabah. Selain itu, sejak tahun 1989 bank Indonesia telah merintis program PHBK yang bertujuan mengusahakan tersedianya pelayanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara kelompok. Keberhasilan program PHBK telah menarik minat *asian development bank* (ADB) untuk memberikan bantuan teknis, akan tetapi juga bantuan keuangan melalui pelaksanaan PKM yang dimulai pada tahun 1995.

Dalam rangka meningkatkan kredit usaha kecil dan koperasi, pada bulan april 1994, telah dilakukan penyempurnaan lebih lanjut mengenai ketentuan KUT, KKUD, dan KKPA. SKIM dan KKUD diperluas sehingga dapat meningkatkan pemberian kredit untuk mendukung pelestarian swasembada pangan dan pengembangan koperasi, pada bulan april 1995 telah dikeluarkan

KUT pola khusus untuk mendampingi ketentuan KUT yang sedang berlaku (KUT pola umum). Penyempurnaan KUT pola khusus ini antara lain meliputi peningkatan peranan kelompok tani dan penyederhanaan prosedur pengajuan permohonan kredit.

Sedangkan untuk skim KKPA, telah disempurnakan antara lain :

- a. Memperluas sektor usaha yang dapat dibiayai menjadi untuk semua sektor ekonomi, termasuk sektor perdagangan dan jasa, khususnya untuk membiayai investasi.
- b. Menaikan nilai flapon kredit dari Rp.30 juta menjadi Rp.50 juta untuk masing-masing anggota.

Dalam rangka meningkatkan akses anggota koperasi dalam memperoleh KKPA, salah satu kebijakan yang ditempuh oleh bank Indonesia adalah mengalakkan pemberian KKPA melalui pola kemitraan, yaitu kerja sama antara perusahaan dengan koperasi atau anggota sampai dengan tahun 1995, KKPA yang sebaqian besar dananya disalurkan melalui pola kemitraan telah berkembang cukup baik. Namun demikikan, apabila flapon KLBI yang disediakan, penyerapannya masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain disebabkan koperasi masih sulit mengungkapkan kelayakan usahanya dan masih sulit untuk mendapatkan usaha yang besar yang mau dan mampu sebagai mitra usaha kecil. Untuk mengevaluasi KKPA, khususnya untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pola kemitraan.

Untuk lebih memacu bank-bank persero agar lebih banyak melayani pengusaha kecil, khususnya yang tidak memiliki anggaran tambahan, pada bulan oktober 1995, pemerintah memperkenalkan kredit kelayakan usaha (K KU). Kredit ini didasarkan atas kelayakan usaha kecil dan mutlak mempersyaratkan tambahan. Untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan K KU tersebut, maka pada bulan desember 1996 dilakukan penelitian terhadap realisasi pelaksanaan pemberian K KU. Selanjutnya untuk lebih memperkuat komitmen dan motivasi bank-bank, serta mempertegas sanksi dan imbalan dalam pencapaian realisasi kredit usaha kecil dan menghasilkan praktek-praktek yang bersifat kosmetik dan pemenuhan kewajiban, bank Indonesia pada bulan april 1997 kembali melakukan penyempurnaan, antara lain :

- a. Semua bank, termasuk bank asing dan bank campuran, dikenakan kewajiban kredit usaha kecil yang dihitung atas dasar persentase tertentu dalam jumlah ekspansi kredit bank yang bersangkutan.
- b. Cakupan kredit usaha kecil diperluas.
- c. Kriteria usaha kecil disesuaikan dengan memperhatikan UU.NO.9.tahun 1995 tentang usaha kecil.
- d. Sanksi dan intensif tidak lagi dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank, melainkan dalam bentuk finansial.
- e. Pola kerja sama jual beli SBPU-KUK dihapuskan.

Selain upaya penyempurnaan dalam pemberian dari bantuan keuangan, perbankan juga berupaya meningkatkan bantuan teknis melalui strategi PPUK dan PHBK serta memperkenalkan PKM. Strategi PPUK lebih dipokuskan pada kegiatan indentifikasi dan pembinaan program kemitraan terpadu (PKT) serta penyempurnaan materi. Khusus pejabat pemberi kredit usaha kecil (KPPUK) atau counterpart training. Sedangkan strategi PHBK dirumuskan untuk memperluas jangkauan kualitas hubungan bank dengan kelompok swasembada masyarakat (KSM). Disamping itu, mengingat usaha mikro memiliki potensi untuk menciptakan lapangan usaha dengan biaya investasi yang rendah dan dapat meningkatkan rakyat miskin dan mendekati miskin, maka pada bulan februari 1995 telah diperkenalkan PKM yang bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada nasabah mikro dipedesaan dan bantuan teknis untuk memperkuat kelembagaan peserta proyek, yaitu bank perkreditan rakyat . LKDP, dan LPSM serta bank pembangunan daerah.

Selama ini telah dilakukan pula beberapa kegiatan lainnya, seperti promosi kredit usaha kecil melalui media elektronika maupun media cetak dan memperluas kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait. Mulai 1 september 1995, bank Indonesia melalui instansi terkait mengaktifkan kembali dan memperluas forum komunikasi perbankan yang dikenal dengan forum komunikasi perbankan usaha kecil (FKP – PUK). Dalam rangka lebih mengoptimalkan pemberian kredit usaha kecil oleh bank umum kepada bank perkreditan rakyat, bank Indonesia mengakomodasikan dalam bentuk program dana perbanas (Dabanas). Untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan

instansi yang terkait untuk mengembangkan usaha kecil. Bank Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait melakukan pelatihan-pelatihan antara lain, pelatihan petugas konsultasi lapangan (KPL) pelatihan manajemen usaha kecil (MUK), dan pelatihan karyawan PT. ASKRINDO.

C. Penyempurnaan Kredit Usaha Kecil.

Untuk menyempurnakan efektivitas pemberian kredit usaha kecil, pada tahun 1993 dilakukan penyempurnaan ketentuan kredit usaha kecil yang memiliki pokok-pokok penyempurnaan yang berisikan antara lain :

- a. Peningkatan flapon kredit usaha kecil per nasabah dari Rp. 200 juta menjadi Rp. 250 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya kebutuhan untuk penyesuaian dengan inflasi.
- b. Perluasan cakupan kredit usaha kecil yaitu dengan flapon 15 juta sampai 25 juta diperhitungkan sebagai kredit usaha kecil, tanpa melihat jenis penggunaannya. Perluasan ini untuk mempermudah bank dalam memberikan kredit yang berskala kecil, karena dalam pemberian kredit tersebut sulit dibedakan antara pengguna produktif atau konsumtif.
- c. Perluasan pola kerja sama dalam penyaluran kredit usaha kecil dengan memasukan jual beli SBPU KUK. Perluasan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada bank-bank yang bergerak di bidang korporasi agar dapat meningkatkan kerja sama kredit usaha kecilnya dengan bank-bank yang bergerak di bidang retail, dengan demikian pola kerja sama penyaluran kredit usaha kecil menjadi :

1. Pinjaman langsung dari bank umum kepada bank perkreditan rakyat.
2. Pembiayaan bersama (*joint financing*).
3. Penerusan kredit (*channeling*).
4. Anjak piutang (*factoring*).
5. Penerbitan SBPU KUK.

Serangkaian kebijakan kredit usaha kecil yang di tempuh telah mendorong perkembangan pemberian kredit usaha kecil secara positif. Posisi kredit usaha kecil meningkat rata-rata sekitar 20 % per tahun dari Rp. 14,1 triliun pada akhir desember 1989 menjadi Rp. 22,6 triliun pada mei akhir maret 1997. rasio kredit usaha kredit seluruh perbankan juga meningkat dari 17,5 % pada akhir desember menjadi 22,2 % pada akhir maret 1997.

D. Penelitian Dampak Ekonomi Kredit Usaha Kecil.

Untuk mengetahui apakah kebijakan kredit usaha kecil telah berhasil mencapai tujuannya dalam pengembangan usaha kecil, pada bulan September 1995 dilakukan penelitian dampak ekonomi pada usaha kecil antara lain, peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah dan peningkatan investasi.

Beberapa permasalahan yang di hadapi oleh bank umum dalam penyaluran kredit usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. Jaringan kantor bank terbatas.

- b. Tenaga *account officer / loan officer* yang menangani KUK kurang (kuantitas dan kualitas).
- c. Sulit mendapatkan usaha kecil yang layak.
- d. Usaha kecil kurang mampu menyusun proposal kredit.
- e. Permasalahan pemasaran bagi usaha kecil.
- f. Informasi KUK masih kurang.

Untuk mengatasi hambatan tersebut bank umum memiliki beberapa kiat dalam penyusunan kredit usaha kecil yaitu :

- a. Memperluas jaringan ke pelosok daerah.
- b. Dorongan organisasi dan kebijakan yang memadai (membentuk unit khusus).
- c. Menciptakan produk baru kredit usaha kecil.
- d. Pendelegasian wewenang ke kantor cabang (80,6 %).
- e. Mengembangkan pola kemitraan.
- f. Meningkatkan sumber daya manusia.
- g. Keringanan persyaratan dan penyederhanaan prosedur KUK.
- h. Di fokuskan ke target market yang tepat.
- i. Memberikan bantuan dan pembiayaan kepada nasabah.

Sedangkan dampak ekonomi dari pemberian kredit usaha kecil bagi pengusaha kecil antara lain :

- a. Peningkatan sumber pembiayaan usaha, yaitu sebesar 55,9 % di biayai dengan dana KUK dan sisanya 44,1 % di biayai dengan dana lain termasuk dana sendiri 37,6 %.
- b. Peningkatan penyerapan tenaga kerja, rata-rata sebesar 8,97 *full time job equivalent* (FTJE) untuk setiap usaha kecil.
- c. Adanya peningkatan nilai tambah bagi usaha kecil, rata-rata sebesar Rp. 16.385.000,-.
- d. Peningkatan pendapatan usaha kecil sebelum cicilan pinjaman, rata-rata sebesar Rp. 34.261.000,-.

E. Penggunaan Sumber Dana.

Dalam laporan tahunan, dana perbankan yang terkumpul baik yang berasal dari luar negeri masih menunjukkan peningkatan. Dana dari luar negeri meningkat cukup berarti, yang tercermin pada peningkatan kewajiban luar negeri bank-bank dalam negeri, yaitu jumlahnya sebesar Rp. 13,1 triliun pada akhir maret 1992 menjadi Rp. 18,2 triliun pada akhir maret 1993. sebagian besar peningkatan kewajiban tersebut berasal dari off shore borrowing sebesar \$ 1,2 miliar (sampai dengan januari 1993).

Sumber dana dalam negeri sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat sedangkan selebihnya dari tambahan modal berupa modal di sektor dan laba di tahan. Selama tahun laporan, sumber dana perbankan berasal dari tambahan modal meningkat sebesar Rp. 2,3 triliun. Kenaikan yang cukup tinggi ini berkaitan dengan upaya perbankan untuk memenuhi ketentuan KPMM. Sementara

itu, simpanan masyarakat yang merupakan komponen terbesar dari sumber dana perbankan dalam negeri, baik berupa dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang berupa giro, deposito berjangka, dan tabungan, masih menunjukkan peningkatan yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 23,4 . hal ini menunjukkan walaupun sudah menurun, suku bunga pinjaman masih cukup menarik bagi penabung. Simpanan dalam valuta asing selama tahun laporan menunjukkan pertumbuhan yang meningkat, yaitu sebesar 19,6 % di bandingkan dengan 8,8 % pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut berkaitan dengan meningkatnya deposito valuta asing milik bukan penduduk sehubungan dengan masih menariknya suku bunga deposito valuta asing di dalam negeri.

Simpanan masyarakat dalam rupiah secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang sedikit melambat, yaitu 24,6 % di bandingkan dengan 28,8 % pada tahun sebelumnya. Deposito berjangka yang merupakan komponen terbesar dari sumber dana perbankan (54,7 %) secara keseluruhan masih mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi.

Table 4.1. Penghimpun dana menurut jenis dana

Jenis dana	1991/92	1992/93*	1992 / 93
	Perubahan dalam (%)		triliun Rp
Giro	19,4	18,0	25,5
Rupiah	26,0	20,4	20,5
Valuta Asing	"-0,8	12,9	5,0
Deposito			
Berjangka	14,0	13,8	64,6
Rupiah	15,0	10,4	42,9
Valuta Asing	11,4	21,2	21,7
Tabungan	79,7	60,3	28,0
Total Dana	23,5	23,4	118,1
Rupiah	28,8	24,6	91,4
Valuta Asing	8,8	19,6	26,7

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia

F. Penyaluran Dana Bank Melalui Program Kredit.

Kredit perbankan yang merupakan pangsa pasar terbesar dalam penyaluran dana perbankan dua tahun laporan menunjukkan perkembangan yang melambat. Melambatnya pertumbuhan kredit yang berkaitan dengan beberapa faktor, antara lain masih tingginya suku bunga kredit perbankan sebagai akibat dari upaya penyejukan ekonomi sejak pertengahan tahun 1990 serta usaha-usaha konsolidasi Perbankan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian. Walaupun likuidasi bank-bank

dalam laporan tahunan cukup longgar, bank-bank masih menahan diri dalam ekspansi kredit karena khawatir akan menghadapi resiko yang tinggi dan lebih memilih untuk memupuk likuidasi yang untuk sementara di tanamkan dalam penanaman jangka pendek, seperti SBI.

Tabel.4.2. Perkembangan Kredit Perbankan

Rincian	1991 /92	1992 /93	Triliun	Pangsa
	Perubahan (%)		Rp	(%)
Menurut jenis				
penggunaan	16,1	8,0	125,9	100,0
Investasi	26,6	34,4	37,9	30,1
Modal kerja	15,1	-11	79,7	63,3
Konsumsi	-45	6,5	8,3	6,6
Menurut kelompok Bank	16,1	8,0	125,9	100,0
Bank pemerintah	12,9	11,9	69,1	54,9
Bank swasta nasional	18,7	2,3	43,3	34,4
BPD	41,6	14,6	3,0	2,4
Bank Asing	32,5	7,5	9,7	7,7
Bank Indonesia	13,3	-79	0,8	0,6
Menurut sektor ekonomi	16,1	8,0	125,9	100,0
Pertanian	16,6	14,5	10,2	8,1
Pertumbuhan	13,2	-3	0,7	0,5
Perindustrian	13,1	22,9	43,5	34,6

Perdagangan	7,8	3,4	33,0	26,2
jasa-jasa	26,5	19,3	26,9	21,4
Lain-lain	27,2	-323	11,6	9,2
Dalam Rupiah dan Valas	16,1	8,0	125,9	100,0
Rupiah	10,4	5,4	102,5	81,4
Valas	56,8	21,1	23,4	18,6

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia

Berdasarkan penggunaan, kredit modal tetap mempunyai peranan terbesar terhadap kredit perbankan, yaitu 63,3 % diikuti oleh kredit investasi 30,1 % dan kredit konsumsi 6,6 %. Dalam tahun laporan, kredit investasi dan kredit konsumsi masih menunjukkan peningkatan dari seluruh kredit perbankan, kredit yang di berikan oleh bank pemerintah tetap mempunyai peranan terbesar. Namun dalam tahun laporan, kredit yang di berikan oleh bank pemerintah mengalami pertumbuhan yang sedikit melambat, yaitu sebesar 11,9 % dibandingkan dengan 12,9 % pada tahun sebelumnya. Pemberian kredit oleh bank umum swasta nasional (BUSN) dalam tahun laporan juga menunjukkan pertumbuhan yang melambat, yaitu dari 18,7 % menjadi 2,3 %.

Sejak paket kebijaksanaan 29 januari 1990 pemberian kredit ekspor tidak lagi di dukung dengan kredit likuiditas bank Indonesia (KLBI), dalam tahun laporan kredit ekspor masih menunjukkan peningkatan walaupun dengan pertumbuhan yang melambat. Masih meningkatnya kredit ekspor tersebut, selain berpengaruh pada ketentuan bank Indonesia masih mewajibkan bank-bank untuk

memberikan sekurang-kurangnya 80 % dari seluruh kredit valuta asing untuk membiayai kegiatan ekspor.

Dan kredit kepada pengusaha kecil yang tercermin dalam pemberian kredit usaha kecil (KUK) dalam tahun 1992 / 1993 (sampai dengan desember 1992) secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar Rp. 80 miliar sehingga mencapai Rp. 22,6 triliun. Dengan peningkatan tersebut, tingkat rasio kredit usaha kecil selama tahun laporan mencapai rata-rata 20,9 % .

Tabel 4.3. Perkembangan Kredit Dan Dana Bank

Rincian	Posisi akhir periode	
	1991 / 92	1992 / 93*
	Dalam triliun Rp	
Kredit		
Bank pemerintah	61,8	69,1
Bank umum swasta nasional	42,3	43,3
Bank pembangunan daerah	2,6	3,0
Bank asing	9,1	9,7
Jumlah	115,7	125,1
Dana		
Bank pemerintah	42,4	55,0
Bank umum swasta nasional	43,2	51,8
Bank pembangunan daerah	2,9	3,6
Bank asing	7,2	7,7

Jumlah	95,7	118,1
Surplus (+) gap (-)	-200	-70
Dana kredit		
Nisbah kredit / dana %	120,9	105,9
Tidak termasuk kredit langsung BI		

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia

Upaya-upaya peningkatan pemberian kredit usaha kecil tersebut antara lain dilakukan melalui kerja sama antara bank umum ataupun antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat. Kerja sama tersebut dapat berupa pemberian kredit usaha kecil dari bank umum kepada bank perkreditan rakyat, pembiayaan bersama, anjak piutang, dan penerusan dana (*channeling*). Selama tahun laporan, sebanyak 25 bank umum telah melakukan kerja sama dengan bank perkreditan rakyat dengan jumlah pembiayaan untuk pengusaha kecil mencapai Rp 1,5 triliun. Sementara itu, untuk mendorong pengembangan usaha (sektor informal). Bank Indonesia terus melanjutkan pemberian bantuan melalui proyek pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat (PHBK), melalui proyek tersebut, para pengusaha kecil di harapkan dapat memperoleh akses yang lebih kepada bank. Proyek yang di Bantu oleh *Gessell scaft for techische zusammenar beit* (GTZ) atau pemerintah Jerman tersebut telah dilaksanakan di 9 provinsi, yaitu sumatera utara, lampung, bali, sumatera selatan, dan semua provinsi di jawa.

Dalam upaya untuk mendorong usaha koperasi dan anggotanya serta untuk meningkatkan pendapatan petani dan pengadaan pangan nasional. Bank Indonesia

masih menyediakan kredit likuiditas bagi pembiayaan usaha tersebut. Di samping itu, sejalan dengan upaya penurunan suku bunga, terhitung sejak Maret 1993 suku bunga kredit likuiditas untuk skim kredit-kredit tersebut telah di turunkan, yaitu dari 16 % menjadi 14 % untuk semua kredit usaha tani dan dari 18 % menjadi 16 % masing-masing untuk koperasi unit desa (KUD), koperasi primer, dan pengadaan pangan melalui badan urusan logistik (BULOG) . Seiring dengan usaha tersebut, selama tahun laporan pemberian kredit kepada koperasi dan kredit usaha tani menunjukkan peningkatan berarti. Kredit kepada koperasi yang terdiri atas koperasi unit desa untuk pengadaan pangan, palawija, pupuk, dan cengkeh mengalami peningkatan sebesar 17,9 % dan tebu rakyat intensifikasi (TRI) sebesar 12,8 %, sedangkan kredit usaha tani yang di gunakan untuk pembiayaan intensifikasi padi dan palawija mengalami peningkatan sebesar 6,4 % . dapat di tambah jumlah bank yang menyalurkan kredit koperasi dengan pola kredit koperasi primer untu anggota (KKPA) masih terbatas, yaitu 22 bank pada akhir tahun yang terdiri atas 4 bank pemerintah, 7 bank pembangunan daerah (BPD), dan 11 bank swata nasional.